



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025



Disusun Oleh :

**Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Batam**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesainya Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Batam yang merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk menerangkan tingkat pencapaian sasaran atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 merupakan perkembangan capaian kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Pangkalan PSDKP Batam melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan serta melakukan perbaikan sistem dan strategi melalui koordinasi secara terus menerus dengan berbagai pihak untuk perbaikan kinerja selanjutnya.

Dengan adanya Laporan Kinerja triwulan II Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan permasalahan di Pangkalan Pengawasan SDKP Batam dalam melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta diharapkan dapat membuka pemikiran lebih kreatif dari berbagai pihak tentang bagaimana meningkatkan peran dan kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Batam.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan tanggung jawab penyelenggaraan Negara tentu saja Laporan ini sangat terbuka terhadap saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan akuntabilitas publik.

Batam, 18 Juli 2025
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan Batam,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Semuel Sandi Rundupadang

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Batam merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari rencana pada Triwulan II tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja sesuai dengan Renstra 2025-2029. Penyusunan LKj merupakan bentuk pertanggung jawaban Kepala Pangkalan PSDKP Batam kepada Direktur Jenderal PSDKP atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program atau kegiatan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Disamping itu juga sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran.

Seluruh target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) dari masing-masing sasaran strategis Pangkalan PSDKP Batam triwulan II 2025 telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini karena sebagian besar kegiatan yang akan dilakukan telah disusun dan direncanakan pada awal tahun, sehingga pelaksanaan kegiatan pada periode berjalan sudah mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan. Selain itu adanya koordinasi dengan berbagai instansi dan serta pendampingan dari tim Direktorat serta sekretariat Ditjen. PSDKP turut mendukung tercapainya target kinerja Pangkalan PSDKP Batam.

Pada semester II tahun 2025 terdapat kendala yaitu adanya efisiensi anggaran berdasarkan inpres nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi bahwa ada beberapa sasaran kinerja sudah dilaksanakan namun belum dapat dihitung capaiannya pada triwulan II khususnya terkait dengan operasi armada kapal pengawas dan pembinaan pokmaswas.

Pada triwulan II tahun 2025 ini capaian kinerja Pangkalan PSDKP Batam sebesar **106,34** dengan penilaian BAIK. Alokasi anggaran Pangkalan PSDKP Batam TA. 2025 sebesar Rp. 39.350.325.000 namun setelah efisiensi beberapa anggaran diblokir menjadi Rp. 32.142.276.000. Anggaran tersebut terbagi menjadi dua program, yaitu program pengelolaan kelautan dan perikanan serta program dukungan manajemen dengan total realisasi anggaran semester II tahun 2025 sebesar Rp. **12.047.976.437,-** atau **30,61%**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Isu Aktual Pengawasan SDKP	2
1.4 Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Batam.....	3
1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Rencana Strategis 2024-2029 Pangkalan PSDKP Batam.....	12
2.2 Visi, Misi dan Tujuan Pangkalan PSDKP Batam	12
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pangkalan PSDKP Batam	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
3.1 Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Batam.....	18
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	20
3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	69
3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	70
BAB IV PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Rekomendasi	72
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2025.....	15
2. Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan SDKP Batam Triwulan II Tahun 2025.....	18
3. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Batam Triwulan II Tahun 2025.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Batam	6
2. Wilayah Administrasi Pangkalan PSDKP Batam.....	11

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam (Pangkalan PSDKP Batam) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar akan dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pengawasan SDKP 2025-2029 (namun sampai saat ini masih dalam rancangan).

Pelaksanaan program/kegiatan Pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan akuntabel, efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Pengelolaan kinerja tersebut secara garis besar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Kewajiban suatu organisasi untuk melakukan pengelolaan kinerja telah diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai bentuk implementasi SAKIP tersebut, Pangkalan PSDKP Batam telah melakukan Pengukuran kinerja secara berkala dan melaporkannya secara rutin kepada Direktur Jenderal PSDKP.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan laporan Kinerja yaitu untuk melaporkan capaian program/kegiatan pada tahun 2025 Triwulan II dan sebagai bahan evaluasi atas program/kegiatan yang telah direncanakan apakah sudah sesuai dengan pencapaian yang diharapkan atau masih di bawah dari target kinerja yang sudah ditetapkan.

Tujuan dari penyusunan laporan kinerja ini yaitu sebagai laporan capaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Batam Triwulan II Tahun 2025.

1.3 Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pengawasan Pangkalan PSDKP Batam yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain:

1. Bidang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
 - a. Masih adanya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 711 yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA);
 - b. Masih adanya Kapal Ikan Indonesia (KII) yang melakukan operasi penangkapan pada wilayah yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha;
 - c. Adanya kegiatan penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) ke luar negeri melalui Palembang dan jambi kemudian diseberangkan ke singapura melalui laut disekitar Pulau Batam;
 - d. Adanya ikan hasil importasi yang masih belum sesuai dengan peruntukannya;

- e. Masih terdapat pelaku usaha yg tidak taat peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan ikan dilindungi;
- f. Adanya masyarakat yang membudidayakan ikan invasif;
- g. Kegiatan usaha perikanan belum mempunyai perizinan berusaha;
- h. Kegiatan usaha perikanan yang belum memenuhi perizinan berusaha.

2. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

- a. Adanya kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha;
- b. Adanya pemanfaatan ruang laut yang belum berizin;
- c. Adanya pemanfaatan pulau2 kecil yang tidak memiliki perizinan;
- d. Masih adanya pelaku usaha subsektor Kelautan yg belum taat dalam perizinan;
- f. Pemanfaatan kawasan konservasi yang belum sesuai ketentuan.

1.4 Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Batam

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 69/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Batam merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pangkalan Pengawasan SDKP Batam menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu :

1. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran

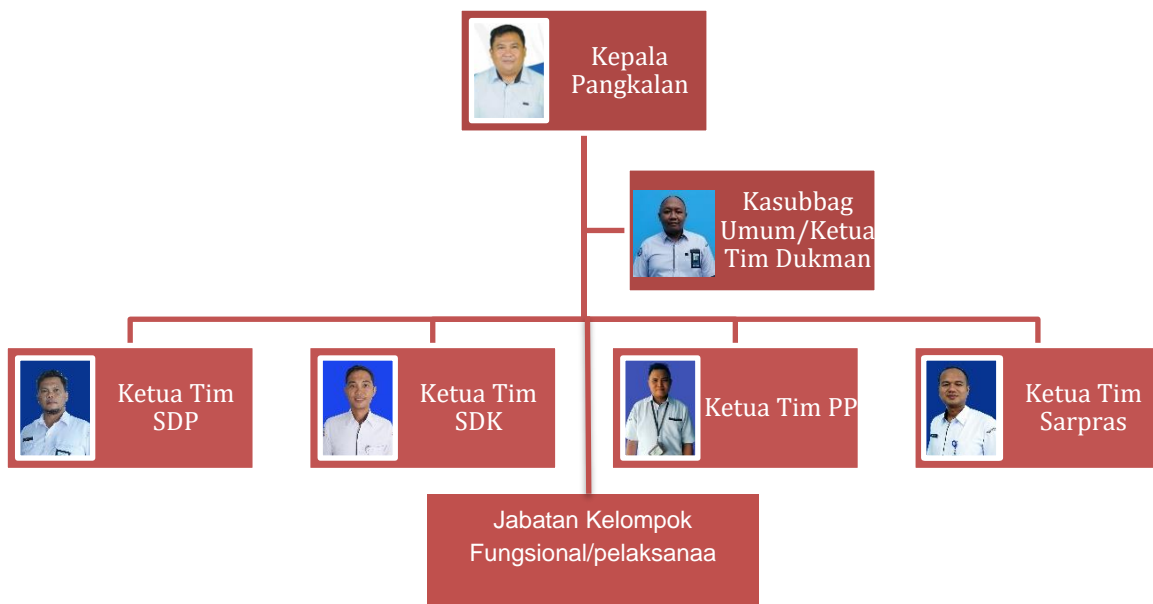
- serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 3. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas;
 4. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan;
 5. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
 7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Kemudian terhadap pelaksanaan tugas pokok tersebut, terdapat beberapa sasaran kegiatan di Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2025, antara lain:

1. Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif;
2. Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif yaitu:
 - a. Operasi Kapal Pengawas HIU 03 dan HIU 017;
 - b. Operasional 13 *Speedboat/Rigid Inflate Boad/Rubbe Boat/Unit Reaksi Cepat*;
3. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan;
4. Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif
5. Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan yaitu:
 - a. Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya
 - b. Pengawasan Pencegahan Pencemaran/pengelolaan limbah.

6. Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan yaitu Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya:
Tindak lanjut hasil pengawasan yang terindikasi melakukan TPKP;
7. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan, yaitu:
 - a. Terselesaikannya pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan;
 - b. Terselesaikannya pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.
8. Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan;
9. Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pangkalan PSDKP Batam di pimpin oleh Kepala Pangkalan yang merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator. Kepala Pangkalan membawahi Kepala Subbagian Umum yang merangkap sebagai Ketua Tim Dukungan Manajemen, Ketua Tim Intelejen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Ketua Tim Intelejen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ketua Tim Penanganan Pelanggaran, Ketua Tim Prasarana, Sarana dan Operasional Kapal Pengawas serta Kelompok Jabatan Fungsional dengan total sumber daya manusia yang ada sejumlah 164 pegawai yang terdiri dari 82 PNS, 21 PPPK, 22 PPNPN dan 39 PJLP sebagaimana gambar 1 berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Batam

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing Tim Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Batam diuraikan sebagai berikut:

1. Tim Kerja Dukungan Manajemen

Tugas :

Melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga serta pengelolaan BMN dan perlengkapan di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam.

Fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, dan analisis data, dan pengolahan kinerja, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta penyusunan bahan pimpinan;

- b. Penyiapan perencanaan, pengembangan, disiplin, kesejahteraan, mutasi, tata usaha sumber daya manusia aparatur serta pengelolaan jabatan fungsional tertentu;
- c. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, tindak lanjut laporan hasil audit, manajemen risiko, dan penyusunan laporan keuangan, penatausahaan, pemanfaatan, penggunaan, penghapusan dan pelaporan barang miliknegara, serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta urusan tata usaha, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

2. Tim Kerja Sarana, Prasarana dan Operasi Kapal Pengawas

Tugas :

Melaksanakan kegiatan hasil dari perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan operasi armada lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

Fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan;
- b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan

dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
dan

- c. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasn, pengawakan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan.

3. Tim Kerja Intelejen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Tugas :

Melaksanakan kegiatan hasil dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan Sumber Daya Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

Fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya perikanan;
- b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bidang penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya perikanan; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan sumber daya perikanan.

4. Tim Kerja Intelejen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Tugas :

Melaksanakan kegiatan hasil dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan Sumber Daya Kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

Fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya kelautan;
- b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bidang penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya kelautan; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan sumber daya kelautan.

5. Tim Kerja Penanganan Pelanggaran

Tugas :

Melaksanakan kegiatan hasil dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat Penanganan Pelanggaran, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

Fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;

- b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bidang penyelenggaraan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan.

Pangkalan Pengawasan SDKP Batam dalam melaksanakan tugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di wilayah Propinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Jambi membawahi 7 (tujuh) Satuan Pengawasan (Satwas) yaitu Satwas SDKP Tanjung Pinang, Satwas SDKP Natuna, Satwas SDKP Anambas, Satwas SDKP Bangka, Satwas SDKP Belitung, Satwas SDKP Palembang, dan Satwas SDKP Tanjung Jabung Barat. Wilayah administratif Pangkalan Pengawasan SDKP Batam dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Wilayah Adminstratif Pangkalan PSDKP Batam

1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Triwulan I tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

a) Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja, isu aktual pengawasan SDKP, serta tugas dan fungsi Pangkalan PSDKP Batam.

b) Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja triwulan I tahun 2025.

c) Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Menguraikan hasil pengukuran kinerja dan keuangan, evaluasi dan analisis capaian kinerja dan keuangan Pangkalan PSDKP Batam triwulan I Tahun 2025.

d) Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasi perbaikan kinerja ke depan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2025-2029 Ditjen. PSDKP

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Namun demikian, renstra Ditjen PSDKP tahun 2025-2029 masih dalam tahap perumusan sehingga renstra 2024-2029 masih menggunakan renstra 2020-2024. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut:

2.2 Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi Ditjen PSDKP adalah:

“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”

Dengan misi:

- 1 Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi
- 2 Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan
- 3 Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggungjawab;
- 4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP

2. Tujuan Dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen. PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2025. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP tahun 2020-2025 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, yaitu:

Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui peningkatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen. PSDKP.

Berdasarkan Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 tersebut maka disusunlah Sasaran Program Ditjen. PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 sebagaimana berikut:

1. Terselenggaranya pembinaan pokmaswas secara efektif
2. Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP
3. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan
4. Terselenggaranya intelejen kelautan dan perikanan secara efektif
5. Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan
6. Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan
7. Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan
8. Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan
9. Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pangkalan PSDKP Batam

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan iktikad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam periode waktu satu tahun, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; ⁽³⁾ Sebagai dasar penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽⁴⁾ Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja Pangkalan PSDKP Batam tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pada periode sebelumnya. Anggaran Pangkalan PSDKP Batam tahun 2025 sebesar Rp. 39.350.325.000,-. Untuk Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2025 pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	82
2	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	2	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92
		3	Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)	92
3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	4	Persentase sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		5	Persentase prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		6	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100
4	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	7	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75
		8	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (Nilai)	75
5	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	9	Indeks kinerja pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
6	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	10	Indeks kinerja pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100
7	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	81
		12	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81
8	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	13	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	94
9	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	14	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	71,5
		15	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	92
		16	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Indeks)	81
		17	Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	86
		18	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	100
		19	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang	95

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
			dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	
		20	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	88,5
		21	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	80
		22	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	80
		23	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Inovasi)	1
		24	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70


Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IKM) dilakukan dengan berpedoman pada formulasi penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual Indikator Kinerja Utama/Informasi Indikator Kinerja. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian yang telah diraih dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan Laporan Kinerja yang didukung Aplikasi “**Kinerjaku**” yang merupakan aplikasi khusus berbasis informasi teknologi.










BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Batam Triwulan II Tahun 2025

Berdasarkan pengelolaan kinerja triwulan II tahun 2025, Capaian Indikator Kinerja Pangkalan PSDKP Batam meliputi 5 Sasaran Kegiatan dengan 05 IKU dan 5 IKM. Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Batam triwulan II tahun 2025 ditabulasikan dibawah ini.

Tabel 2. Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Batam triwulan II tahun 2025

<div>  <div> <div>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</div> <div>e-Kinerja Home</div> </div> <div>Senin, 21 Juli 2025</div> </div>												
<div> <div>NKO Juni - 2025</div> <div>Unit Kerja : PANGKALAN PSDKP BATAM</div> <div>Skor Kinerja : 106,34</div> <div>Download</div> </div>												
<div> <ul style="list-style-type: none"> • Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓ • Jika masih terdapat tanda ✗, silahkan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol • Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung+ </div>												
Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target Juni	Capaian Juni	%	Target s/d Juni	Capaian s/d Juni	%	Tgl Input
S.01	Terselenggaranya Pembinaan Pokmaswas Secara Efektif											
1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,00	0,00			0,00	0,00		14-Jul-2025 14:12
	Tambah Data Dukung+											
S.02	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif											
2	Indeks operasi kapal pengawas	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,00	0,00			0,00	0,00		14-Jul-2025 14:12
	Tambah Data Dukung+											
3	Indeks operasi speedboat pengawas	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,00	0,00			0,00	0,00		14-Jul-2025 14:12
	Tambah Data Dukung+											
4	Persentase sarana pengawasan SDKP yang di selesaikan	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00			0,00	0,00		14-Jul-2025 14:12
	Tambah Data Dukung+											
5	Persentase prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00			0,00	0,00		14-Jul-2025 14:12
	Tambah Data Dukung+											
6	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00			0,00	0,00		14-Jul-2025 14:12
	Tambah Data Dukung+											
S.04	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif											
7	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,00	0,00			0,00	0,00		14-Jul-2025 14:12
	Tambah Data Dukung+											
8	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,00	0,00			0,00	0,00		14-Jul-2025 14:12
	Tambah Data Dukung+											
S.05	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan											
9	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan Data Dukung1 ✓ Data Dukung2 ✓	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	14-Jul-2025 14:12
	Tambah Data Dukung+											
S.06	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan											
10	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan Data Dukung1 ✓ Data Dukung2 ✓	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	14-Jul-2025 14:12
	Tambah Data Dukung+											

<div>  <div> <div>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</div> <div>REPUBLIK INDONESIA</div> </div> <div> <div>e-Kinerja</div> <div>Home</div> </div> </div> <div> <div>Senin, 21 Juli 2025</div> <div></div> </div>											
<div>Tambah Data Dukung+</div>											
S.07 Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan							115,72			115,72	
11	Indeks penguasaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Data Dukung1  Data Dukung2 	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,00	70,00	81,00	115,71	70,00	81,00	115,71
<div>Tambah Data Dukung+</div>											
12	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan Data Dukung1  Data Dukung2 	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,00	70,00	81,00	115,71	70,00	81,00	115,71
<div>Tambah Data Dukung+</div>											
S.08 Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan							109,89			109,89	
13	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan Data Dukung1  Data Dukung2 	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	94,00	91,00	100,00	109,89	91,00	100,00	109,89
<div>Tambah Data Dukung+</div>											
S.09 Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan							106,07			106,07	
14	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satter lingkup Pangkalan PSDKP Batam	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,50	0,00			0,00	0,00	
<div>Tambah Data Dukung+</div>											
15	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satter lingkup Pangkalan PSDKP Batam Data Dukung1  Data Dukung2 	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,00	82,00	96,41	117,57	82,00	96,41	117,57
<div>Tambah Data Dukung+</div>											
16	Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Batam Data Dukung1  Data Dukung2 	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,00	77,00	80,62	104,70	77,00	80,62	104,70
<div>Tambah Data Dukung+</div>											
<div>Tutup</div>											

Analisa dan monitoring yang digunakan pada pencapaian kinerja triwulan II tahun 2025 adalah membandingkan capaian kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target yang di tetapkan dalam Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025 dan capaian kinerja triwulan I tahun 2025.

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Pangkalan PSDKP Batam telah melaksanakan sebagian kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.

*Evaluasi dan analisis pada IKU1 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 1** (**Terselenggaranya pembinaan pokmaswas secara efektif**) yaitu:*

1) Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	TW I	Triwulan II 2025		
Kode	Uraian			Target	Capaian	%
IKU1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	82	-	-	-	-

Target Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas sebesar 82 dan ditetapkan sebagai target Tahunan karena adanya efisiensi anggaran berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang mana anggaran pembinaan pokmaswas sampai dengan Triwulan II menjadi Rp. 0,-. Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS merupakan, sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas terhadap kegiatan pembinaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS) secara baik dan efektif. Alokasi anggaran untuk pembinaan POKMASWAS pada tahun 2025 sebesar Rp. 200.000.000,- namun sampai Triwulan II 2025 terkena efisinesi semuanya sehingga belum terlaksana. Pada tahun 2024, kegiatan pembinaan pokmaswas terlaksana 100% yang dilaksanakan di 2 (dua) lokasi yaitu di Jambi dan Palembang dan harapannya pada tahun 2025 akan terlaksana jika pagu anggaran sudah dibuka kembali.

Evaluasi dan analisis pada IKU2 dan IKU3 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 2 (Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif)** adalah berdasarkan data pada aplikasi e-Kinerjaku, realisasi anggaran hingga Triwulan II Tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.846.182.172 atau 15,18% dari pagu anggaran Rp. 12.160.621.000 dan setelah dikurangi blokir sebesar Rp. 811.710.000 sehingga pagu efektif sebesar Rp 11.348.911.000 dengan persentase realisasi 16,27%. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan Operasi Kapal Pengawas (KP. HIU 03 dan KP. HIU 17), Operasi Speedboat, serta untuk kebutuhan natura, jaga sandar, dan daya tahan tubuh awak kapal. Penggunaan anggaran ini mendukung pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang lebih profesional, meskipun masih terdapat beberapa kegiatan operasi kapal pengawas yang belum sepenuhnya dilaksanakan pada periode ini.

2) Indeks operasi kapal pengawas

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	TW I	Triwulan II 2025		
Kode	Uraian			Target	Capaian	%
IKU2	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92	-	-	-	-

Target Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam pada Tahun 2025 adalah sebesar 92 dan dihitung periode tahunan atau penghitungan pada akhir tahun karena adanya efisiensi anggaran di awal tahun 2025. Pada Triwulan II Tahun 2025, Pangkalan PSDKP Batam telah melaksanakan patroli selama 36 hari operasi dengan rincian: KP Hiu 03 selama 20 hari dan KP Hiu 17 selama 16 hari.

No	Nama Kapal	Hps Tera mbil	Diperiksa (Unit)					Ditangkap (Unit)			Sita Alat Tangkap (Unit)			Riksa Objek Kelautan
			KII	KIA	KIP	SDK	JML	KII	KIA	JML	KII	KIA	JML	
1	Hiu 03	20	36	0	1	3	40	5	0	5	0	0	0	0
2	Hiu 17	16	35	0	0	0	35	0	0	0	2	0	2	2
Total		36	71	0	1	3	75	5	0	5	2	0	2	2

Wilayah operasi ini meliputi WPPNRI 711 yang mencakup Laut Natuna Utara, Perairan Kepulauan Riau, Batam, Anambas, Natuna, Karimata, serta Selat Malaka. Adapun periode pelaksanaan dimulai dari bulan April s.d Juni 2025 (triwulan II). Selain itu tercapainya indikator ini dikarenakan cakupan wilayah pengawasan yang tinggi dilakukan oleh Kapal Pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam melalui operasi pengawasan di laut. Selain mengawasi pelaku usaha sumber daya perikanan, kapal pengawas juga melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha kelautan. Pagu anggaran untuk operasi kapal pengawas sebesar Rp. 11.245.267.000 dimana hingga Triwulan II Tahun 2025 tercatat telah terealisasi sebesar Rp. 1.805.476.172 (16,06 %) dari nilai anggaran. Pagu anggaran ini kemudian dikurangi blokir sebanyak Rp. 330.075.000 sehingga pagu efektif Operasi Kapal Pengawas sebesar Rp. 10.915.912.000 dengan nilai realisasi Rp. 1.805.476.172 (16,54 %).

3) Indeks kinerja operasi speedboat pengawas

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	TW I	Triwulan II 2025		
Kode	Uraian			Target	Capaian	%
IKU3	Indeks operasi speedboat pengawas	92	-	-	-	-

Target Indeks Kinerja Operasi speedboat pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam pada Tahun 2025 adalah sebesar 92 dan dihitung periode tahunan atau penghitungan pada akhir tahun karena adanya efisiensi anggaran di awal tahun 2025. Pada Triwulan II Tahun 2025. Analisa sama dengan kapal pengawas indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan operasional Speedboat/RIB/Rubberboat/Unit Reaksi Cepat dalam rangka mewujudkan pengendalian dan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang profesional dan partisipatif. target indikator ini tercapai dengan dilaksanakannya operasi pengawasan selama total 28 hari menggunakan Speedboat/RIB/Rubberboat/Unit Reaksi Cepat di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam. Dalam pelaksanaan operasi tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 16 unit kapal perikanan Indonesia dengan wilayah pengawasan perairan sekitar Natuna, Anambas, Batam, dan sekitarnya.

NO	NAMA SPEEDBOAT PENGAWAS	REALISASI HARI OPS	RIKSA		
			KII	RIKSA OBJEK KELAUTAN	JML
1	Napoleon 016	3	3	0	3
2	RIB-X8	5	11	2	13
3	HIU BIRU 1	10	1	0	1
4	HIU BIRU 2	10	1	0	1
JUMLAH TOTAL		28	16	2	16

Pagu anggaran untuk operasi Speedboat Pengawas pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp. 915.354.000 dan mengalami pengurangan nilai dari blokir anggaran sebesar Rp. 481.635.000 sehingga pagu efektif operasi Speedboat Pengawas Tahun 2025 menjadi Rp. 433.719.000. Realisasi anggaran operasi speedboat pengawas sampai dengan Triwulan II realisasi anggaran sebesar Rp. 40,706,000 (9.42%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 393,013,000 dari pagu yang

tersedia. Anggaran yang sudah terealisasi tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan operasi pengawasan menggunakan Speedboat dalam rangka pengendalian dan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara profesional dan partisipatif.

*Evaluasi dan analisis pada IKU4, IKU5, IKU6 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 3 (Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan)** yaitu:*

4) Persentase sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	TW I	Triwulan II 2025		
Kode	Uraian			Target	Capaian	%
IKU4	Persentase sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan	100	-	-	-	-

Target Indeks Kinerja Persentase sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan lingkup Pangkalan PSDKP Batam pada Tahun 2025 adalah sebesar 100 % dan dihitung periode tahunan. Penghitungan Pemenuhan logistik kapal pengawas merupakan salah satu faktor pendukung utama keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP). Logistik yang memadai memastikan kapal pengawas dapat beroperasi sesuai rencana patroli tanpa hambatan berarti. Adapun aspek-aspek penting pemenuhan dukungan logistik kapal pengawas meliputi, bbm, pelumas, air bersih, serta ongkos angkut BBM. Anggaran dukungan logistik kapal pengawas sebesar Rp. 7.258.754.000. Pada Triwulan II pagu anggaran ini mengalami penambahan nilai dari dibukanya blokir anggaran sebesar Rp. 551.361.000 sehingga nilai anggaran yang menjadi pagu efektif menjadi Rp. 7.810.115.000. Realisasi anggaran dukungan logistik kapal pengawas sampai

dengan Triwulan II sebesar Rp. 1.174.007.298 (15,03 %). Selain itu terdapat anggaran penyediaan logistik lainnya bagi awak kapal pengawas yang mencakup belanja penambahan daya tahan tubuh, biaya delegasi, biaya jaga sandar, dan natura dimana nilai pada anggaran ini sebesar Rp. 1.335.347.000. Pada Triwulan II anggaran ini mengalami pengurangan nilai blokir anggaran sebesar Rp. 141.072.000 sehingga pagu efektif yang tersedia sebesar Rp. 1.194.275.000. Realisasi sampai dengan Triwulan II pada pagu anggaran ini sebesar Rp. 365.915.644 (30,64 %).

5) Persentase prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	TW I	Triwulan II 2025		
Kode	Uraian			Target	Capaian	%
IKU5	Persentase prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan	100	-	-	-	-

Persentase prasarana Pengawasan SDKP Pangkalan PSDKP Batam mendapat target sebesar 100% dan menjadi target tahunan. Rencana pengadaan prasarana pengawasan SDKP tahun 2025 adalah *drone geomapping* 2 (dua) unit dan *GPS handheld* 1 (satu) unit dengan anggaran Rp. 140.000.000,- direncanakan dilakukan pada Triwulan III atau triwulan IV sehingga di Triwulan II Tahun 2025 masih belum ada realisasi.

6) Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	TW I	Triwulan II 2025		
Kode	Uraian			Target	Capaian	%
IKU6	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	100	-	-	-	-

Presentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam mendapat target sebesar 100% dan menjadi target tahunan. Pada triwulan II belum tercapai karena sifatnya akumulatif sampai akhir tahun 2025. Jumlah armada yang dirawat 15 unit yang terdiri dari 2 unit kapal pengawas dan 13 unit speedboat dan sampai triwulan II. Perawatan sarana terdiri dari perawatan pencegahan (*preventive maintenance*), perawatan prediktif (*predictive maintenance*) dan perawatan darurat (*breakdown maintenance*) untuk sarana yang telah melakukan perawatan dapat di lihat pada table di bawah.

Perawatan Pencegahan di bulan April 2025 yang terlaksana dengan 7 unit Armada 2 Kapal Pengawas dan 5 Speedboat (Batam, Palembang, Tanjung Pinang, Belitung).

No	Nama Kapal	Jenis Perawatan		
		Perawatan Pencegahan	Perawatan Prediktif	Perawatan Darurat
1.	Hiu 03	Melakuan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Belum Melaksanakan Kegiatan
2.	Hiu 17	Melakuan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Belum Melaksanakan Kegiatan
3.	Hiu Biru 01	Melakuan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Belum Melaksanakan Kegiatan
4.	Hiu Biru 02	Melakuan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Belum Melaksanakan Kegiatan
5.	Napoleon 15	Melakuan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Belum Melaksanakan Kegiatan
6.	Dolphin 18	Melakuan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Belum Melaksanakan Kegiatan

No	Nama Kapal	Jenis Perawatan		
		Perawatan Pencegahan	Perawatan Prediktif	Perawatan Darurat
7.	Dolphin 008	Melakuan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Belum Melaksanakan Kegiatan

Jumlah pagu anggaran perawatan Rp. 1.966.520.000 namun dikarenakan blokir anggaran sebesar Rp. 333.701.000 sehingga pagu efektif pada anggaran ini menjadi Rp.1.632.819.000. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 262.942.800 (16,10 %). Penggunaan anggaran dipakai untuk belanja barang kebutuhan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas.

Perawatan Pencegahan di bulan Mei 2025 yang terlaksana dengan 9 unit Armada 2 Kapal Pengawas, 6 Speedboat dan 1 Rubberboat bangka (Batam, Palembang, Tanjung Pinang, Belitung, Moro, Bangka)

No	Nama Kapal	Jenis Perawatan		
		Perawatan Pencegahan	Perawatan Prediktif	Perawatan Darurat
1.	Hiu 03	Melakuan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Belum Melaksanakan Kegiatan
2.	Hiu 17	Melakuan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Belum Melaksanakan Kegiatan
3.	Hiu Biru 01	Melakuan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Belum Melaksanakan Kegiatan
4.	Hiu Biru 02	Melakuan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Belum Melaksanakan Kegiatan

No	Nama Kapal	Jenis Perawatan		
		Perawatan Pencegahan	Perawatan Prediktif	Perawatan Darurat
5.	Napoleon 15	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Belum Melaksanakan Kegiatan
6.	Dolphin 18	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Belum Melaksanakan Kegiatan
7.	Dolphin 008	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Belum Melaksanakan Kegiatan
8.	Dolphin 24	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Belum Melaksanakan Kegiatan
9.	Rubber Boat Bangka	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Belum Melaksanakan Kegiatan

Perawatan Pencegahan dan perawatan darurat di bulan Juni 2025 yang terlaksana dengan 7 unit Armada 2 Kapal Pengawas, 4 Speedboat. (Batam, Palembang, anambas, dan Bangka)

No	Nama Kapal	Jenis Perawatan		
		Perawatan Pencegahan	Perawatan Prediktif	Perawatan Darurat
1.	Hiu 03	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Belum Melaksanakan Kegiatan
2.	Hiu 17	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melaksanakan Perawatan darurat
3.	Hiu Biru 01	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melaksanakan Perawatan darurat

No	Nama Kapal	Jenis Perawatan		
		Perawatan Pencegahan	Perawatan Prediktif	Perawatan Darurat
4.	Hiu Biru 02	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melaksanakan Perawatan darurat
5.	Napoleon 15	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Belum Melaksanakan Kegiatan
6.	Napoleon 35	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Belum Melaksanakan Kegiatan
7.	RIB-X8	Belum Melaksanakan Kegiatan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melaksanakan Perawatan darurat

Jumlah pagu anggaran perawatan Rp. 1.966.520.000,- namun terkena efisiensi menjadi Rp.1.632.819.000,- dengan terealisasi sebesar Rp. 262.942.800,- atau sebesar 16,10 % dari pagu efektif dan 13,37% dari pagu anggaran. Penggunaan anggaran dipakai untuk belanja barang kebutuhan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas.

*Evaluasi dan analisis pada IKU7 dan IKU8 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan***

4 (Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif) yaitu:

7) Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	TW I	Triwulan II 2025		
Kode	Uraian			Target	Capaian	%
IKU7	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan	75	-	-	-	-

Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan Pangkalan PSDKP Batam tahun 2025 mendapat target sebesar 75% dan menjadi target tahunan. kegiatan intelijen kelautan 2025 pada triwulan II berupa belanja pembelian ArcGis Online untuk menunjang kegiatan intelijen kelautan. Pagu anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp. 121.747.000,- dan terkena efisiensi menjadi Rp. 20.505.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 4.440.000,- atau 21,65% dari pagu efektif dan 3,64% dari pagu anggaran. Indikator kinerja tingkat akurasi dan validasi hasil intelijen kelautan baru ada tahun 2025 diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan karena tersedia inteligen yang akurat.

8) Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	TW I	Triwulan II 2025		
Kode	Uraian			Target	Capaian	%
IKU8	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan	75	-	-	-	-

Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan Pangkalan PSDKP Batam tahun 2025 mendapat target sebesar 75% dan menjadi target tahunan. Pada triwulan II, telah dilaksanakan 1 kegiatan inteligen yang dituangkan dalam Laporan Informasi (LI) No. Nomor : R / LI – 2 / IV / 2025 / Satwas SDKP Tanjung Pinang, dan menjadi dasar tindak lanjut berupa kegiatan pengamanan terhadap 7 kapal ikan Indonesia yang dikenakan sanksi administratif. Hasil intelijen dapat dikatakan valid/ akurat karena terbukti setelah dilakukan validasi. Pagu anggaran untuk intelijen perikanan pada tahun 2025 awalnya sebesar Rp. 61.790.000,- namun pasca efisiensi menjadi 0, sehingga sampai saat ini belum ada realisasi anggaran. Indikator kinerja tingkat akurasi dan validasi hasil intelijen perikanan diharapkan menghasilkan data intelijen

yang akurat sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan mengingat adanya efisiensi anggaran.

Terjadi peningkatan pada kegiatan intelijen perikanan dikarenakan sudah adanya perjanjian kinerja di UPT Pangkalan PSDKP Batam yang diturunkan kepada masing-masing pengawas di seluruh lingkup UPT Pangkalan PSDKP Batam. Kemudian untuk lebih memantapkan perencanaan kegiatan di tahun 2025, telah diadakan rapat konsolidasi pengawasan di lingkup UPT Pangkalan PSDKP Batam pada tanggal 21-24 April 2025 dengan mengundang narasumber untuk membekali pengawas perikanan menghadapi dinamika pengawasan perikanan di tahun 2025. Namun demikian, anggaran intelijen yang seluruhnya terkena efisiensi menyebabkan keterbatasan pada lingkup kegiatan intelijen yang dapat dilaksanakan. Kegiatan intelijen lebih mengarah kepada cyber intelijen serta pengumpulan data sekunder mengingat keterbatasan anggaran operasional.

*Evaluasi dan analisis pada IKU9 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 5** (Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan) yaitu:*

9) Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	TW I	Triwulan II 2025		
Kode	Uraian			Target	Capaian	%
IKU9	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan	100	100	100	100	100

Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan Pangkalan PSDKP Batam tahun 2025 mendapat target sebesar 100% dan menjadi target triwulanan. Pengawasan pada Triwulan I dilakukan terhadap 6 Pelaku Usaha Pemanfaatan ruang laut, 1 Pelaku Usaha pemanfaatan pesisir (reklamasi), dan 1 Pelaku Usaha jenis ikan dilindungi,

sedangkan untuk pengawasan pada Triwulan II dilakukan terhadap 30 Pelaku Usaha Pemanfaatan ruang laut, 2 Pelaku Usaha perizinan berusaha sektor kelautan pemanfaatan pulau-pulau kecil, 2 Pelaku Usaha perizinan berusaha sektor kelautan wisata tirta lainnya, dan 3 Pelaku Usaha Pencemaran.

Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan tahun 2025 terbentuk dari beberapa komponen, antara lain:

a) Pelaku usaha pemanfaatan ruang laut (yang memiliki KKPR)

Pengawasan pemanfaatan Pelaku usaha yang patuh adalah perorangan/badan yang melakukan usaha dengan memanfaatkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan memiliki dokumen PKPR dan kesesuaian terhadap kegiatan pemanfaatannya.

No	Tanggal Pengawasan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi	Rekomendasi Pemeriksaan	Nilai Indeks Pemeriksaan
1	13 Maret 2025	PT. Indoprisma Karisma Jaya	Des. Pengadah, Kec. Bunguran Timur Laut, Kab. Natuna, Prov. Kepri.	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	100
2	13 Maret 2025	PT Multi Mineral Indonesia	Kelarik, Des. Air Mali, Kec. Bunguran Utara, Kab. Natuna	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	100
3	13 Maret 2025	PT. Mineral Bumi Khatulistiwa	Des. Kelarik, Kec. Bunguran Utara, Kab. Natuna	Belum ada kegiatan atau belum di bangun	100
4	11 Maret 2025	PT. Megah Bangun Sejahtera	Kel. Bengkong Laut, Kec. Bengkong,	Terindikasi melaksanakan reklamasi tanpa dilengkapi	100

			Kota Batam	dengan izin	
5	29 April 2025	PT Andalan Intiagro Indonesia	Desa Dukong, Kec. Simpang Pesak, Kab. Belitung Timur	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	100
6	30 April 2025	CV Surya Tambak Lestari	Desa Dukong, Kec. Simpang Pesak, Kab. Belitung Timur	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	100
7	14 Mei 2025	PT Leebong Octa Samasta	Pulau Klebong, Desa Lasar, Kec. Membalong, Kab. Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	100
8	27 Mei 2025	PT. BSSTEC	Pulau Nipah Jembatan II, Barelang, Kel. Pulau Setokok, Kec. Bulang, Kota Batam	Telah melaksanakan kegiatan berusaha sesuai dengan perizinan yang dimiliki	100
9	5 Juni 2025	PT. Tritunas Sinar Benua (Pulau Nirup)	Pulau Nirup, Kel. Sekanak Raya, Kec. Belakang Padang, Kota Batam	Telah melakukan kegiatan berusaha sesuai perizinan dan perizinan berusaha sudah lengkap	100
10	15 April 2025	Suriadi	Pulau Nguan, Kel. Galang Baru, Kec. Galang, Kota Batam	Tidak ditemukan dugaan perusakan atau pelanggaran di bidang pemanfaatan ruang laut	100
11	21 Mei 2025	PT. Cipta Persada Mulia	Perairan Kepulauan Riau	Tidak ditemukan dugaan perusakan atau pelanggaran di bidang	100

				pemanfaatan ruang laut	
12	17 Juni 2025	PT. Horizon Bandar Bahru	BATAM VIEW BEACH RESORT, JL. HANG LEKIR, RT.000 RW.000,Desa/ Kelurahan Sambau, Kec. Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan dan perizinan yang tertera pada PKKPR	100
13	18 Juni 2025	PT. Teguh Cipta Pratama (Montigo Resort)	Jl. Hang Lekir, Nongsa - Batam	Dipersiapkan untuk membuat laporan tahunan dan direkomendasikan untuk mengurus perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil	100
14	16 Juni 2025	PT. Merah Putih Petro Gas	Pulau Nipah, Kel. Setokok, Kec. Bulang Kota Batam	Segara membuat laporan tahunan PKKPR, jika sudah membuat laporan harap konfirmasi ke Pangkalan PSDKP aBatam	100
15	16 Juni 2025	PT. Multi Auto Protect	Pulau Nipah, Kel. Setokok, Kec. Bulang Kota Batam	Belum Ada Kegiatan	100
16	16 Juni 2025	PT. Multi Auto Protect	Pulau Nipah, Kel. Setokok, Kec. Bulang Kota Batam	Belum Ada Kegiatan	100
27	23 Juni 2025	PT. Karimun Granit	Pasir Panjang Kecamatan Meral	Agar Menyampaikan Laporan Tahunan	100

			Kab.Tanjung Balai Karimun Prov.Kepulaua n Riau	2022	
28	25 Juni 2025	PT. Surya Freshindo Intimas	Jl.Nusantara Kel Tanjung Balai Kota Kec.Karimun Kab.Karimun Prov.Kepulaua n Riau	Agar Menyampaikan Tanda Terima Laporan Tahunan 2023	100
29	25 Juni 2025	PT. Lautan Fishery Natuna	Tanjung Kumbik Utara, Desa. Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat, Kab. Natuna, Prov. Kepulauan Riau.	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	100
30	25 Juni 2025	PT. Neptuna Dwindo Matrina	Selat Lampa, Desa. Sabang Mawang Barat, Kec. Pulau Tiga, Kab. Natuna, Prov. Kepulauan Riau.	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	100
CAPAIAN				30	100

b) Pelaku usaha perizinan berusaha sektor kelautan

Pelaku usaha yang patuh adalah perorangan/badan yang melakukan usaha dengan memanfaatkan wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil. Pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir fokus pada aktivitas reklamasi dengan kepemilikan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

No	Tanggal Pengawasan	Jenis Pengawasan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi	Rekomendasi Pemeriksaan	Nilai Indeks Pemeriksaan
1	15 Mei 2025	Pengawasan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	Pulau Klebong (PT Leebong Octa Samasta)	Pulau Klebong, Desa Lasar, Kec. Membalong, Kab. Belitung	Tidak ditemukan indikasi pelanggaran	100
2	5 Juni 2025	Pengawasan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	PT. Tritunas Sinar Benua (Pulau Nirup)	Pulau Nirup, Kel. Sekanak Raya, Kec. Belakang Padang, Kota Batam	Tidak ditemukan indikasi pelanggaran	100
3	15 Mei 2025	Pengawasan Wisata Tirta Lainnya	PT Leebong Octa Samasta	Pulau Klebong, Desa Lasar, Kec. Membalong, Kab. Belitung	Tidak ditemukan indikasi pelanggaran	100
4	5 Juni 2025	Pengawasan Wisata Tirta Lainnya	PT. Tritunas Sinar Benua	Pulau Nirup, Kel. Sekanak Raya, Kec. Belakang Padang, Kota Batam	Tidak ditemukan indikasi pelanggaran	100
CAPAIAN					4	100

c) Pelaku usaha perizinan berusaha sektor kelautan *Pengawasan ikan dilindungi*

Pengawasan ikan dilindungi pada triwulan I merupakan kegiatan yang diamanahkan pada timja SDK, namun pada triwulan II kegiatan pengawasan ikan dilindungi dialihkan menjadi pengawasan pada timja SDP.

d) Pelaku usaha perizinan berusaha sektor kelautan *Pengawasan Pencemaran*

Pelaku usaha adalah perorangan/badan yang melakukan usaha di bidang sektor kelautan, perikanan, dan usaha lainnya. Patuh dalam pencegahan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya.

Pengawasan dilaksanakan pada pelaku usaha sektor kelautan terhadap pengelolaan pencemaran yang ditimbulkan terhadap kegiatan usaha.

No	Tanggal Pengawasan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi	Rekomendasi Pemeriksaan	Nilai Indeks Pemeriksaan
1	27 Mei 2025	PT Batam Slop & Sludge Treatment Centre	Pulau Nipah Jembatan II, Bareleng, Kel. Pulau Setokok, Kec. Bulang, Kota Batam	Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya tersebut di atas, maka diberikan rekomendasi untuk tetap menjaga lingkungan dan pengelolaan limbah dengan baik dan tidak menimbulkan pencemaran	100
2	5 Juni 2025	PT. Tritunas Sinar Benua (Pulau Nirup)	Pulau Nirup, Kel. Sekanak Raya, Kec. Belakang Padang, Kota Batam	Tidak ditemukan indikasi pelanggaran pencemaran karena air limbah rumah tangga diolah dengan baik	100
3	16 Juni 2025	PT. Merah Putih Petro Gas	Pulau Nipah, Kel. Setokok, Kec. Bulang Kota Batam	Tidak ditemukan indikasi pelanggaran pencemaran karena air limbah rumah tangga diolah dengan baik	100
CAPAIAN				3	100

Alokasi anggaran untuk pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan pada tahun 2025 sebesar Rp. 830.000.000,- dan setelah ada revisi tersedia pada Triwulan II sebesar Rp. 120.615.000,- serta terealisasi sebesar Rp. 35.016.900,- atau 29,03% dari pagu efektif. Dengan adanya efisiensi pada tahun ini menjadi hambatan tersendiri terkait realisasi kegiatan.

Evaluasi dan analisis pada IKU10 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 6** (*Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan*) yaitu:

10) Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	TW I	Triwulan II 2025		
Kode	Uraian			Target	Capaian	%
IKU10	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100	100	100	100	100

Pada tahun 2025, Pangkalan PSDKP Batam memiliki target Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan dengan nilai 100 yang dihitung kinerjanya per triwulan. Pengawasan pelaku usaha perikanan terdiri dari Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR), Pengawasan Importansi Ikan, Pengawasan Destructive Fishing, Pengawasan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan berupa pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi (JIL), dan Jenis Ikan Membahayakan dan Merugikan (JIMM), serta pengawasan terhadap objek yang menjadi atensi pimpinan berupa pengawasan hasil aduan masyarakat, pengawasan pelaku usaha illegal, dan pengawasan pada kampung perikanan budidaya. Adapun indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan merupakan nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha yang terdiri dari kelengkapan dalam hal persiapan sebelum melakukan kegiatan pengawasan, kelengkapan dalam hal pelaksanaan kegiatan pengawasan, dan kelengkapan dalam hal pelaporan hasil kegiatan pengawasan.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan di lingkup UPT Pangkalan PSDKP Batam pada Triwulan II tahun 2025 berjumlah 35 kegiatan yang terdiri dari 3 kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, 2 kegiatan pengawasan Jenis Ikan Membahayakan dan Merugikan (JIMM), 6 pengawasan Jenis Ikan yang Dilindungi (JIL), 7 kegiatan pengawasan Kampung Perikanan Budidaya (KPB), 9 kegiatan penanganan aduan masyarakat, dan 8 pengawasan kegiatan perikanan *illegal*. Selain itu, pengawasan juga dilakukan terhadap kapal perikanan yang datang dan berangkat dari pelabuhan perikanan untuk mendukung program Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Rekap hasil pengawasan sumber daya perikanan pada triwulan II termuat dalam tabel di bawah ini :

No	Tanggal Pengawasan	Jenis Pengawasan	Nama Perusahaan/Perorangan	Alamat Pelaku usaha	Analisa Hasil Monitoring/Pengawasan	Rekomendasi Pemeriksaan	Nilai Indeks Pemeriksaan
1	04/29/2025	Was PBBR Pembudidayaan Ikan	PT CENTRAL PROTEINA PRIMA	Treasury Tower 8th Floor District 8, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, SCBD	Telah Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha Dan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha	Telah Memenuhi Syarat	100
2	5/22/2025	Was PBBR Pembudidayaan Ikan	LAUTAN SEJAHTER A MANDIRI	Pulau Bulan, PO BOX 502/Batam Center45qt	Telah memiliki perizinan berusaha, telah dilengkapi CBIB, memiliki IPAL (Kolam pengendapan)	Telah Memenuhi Syarat	100
3	6/12/2025	Was PBBR Pengolahan Hasil Perikanan	PT LESTARI MAGRIS	JL. MUARA KARANG RAYA NO. 117-119, KEL. PLUIT	Dokumen lengkap sesuai OSS dan KBLI	Telah Memenuhi Syarat	100
4	5/14/2025	Jenis Ikan Membahayakan dan Merugikan (JIMM)	PALEMBANG BIRD PARK	Jl. Gubernur H.A. Bastari Jakabaring Kawasan OPI Mall, Kel. Sungai Kedukan, Kec. Rambutan	Terdapat pemanfaatan ikan alligatgar (<i>Lepisosteus spp.</i>)	Penyerahan secara sukarela dan penanganan barang hasil pengawasan sesuai ketentuan peraturan	100

						perundang-undangan.	
5	6/3/2025	Jenis Ikan yang Dilindungi	Hoki Arwana	Batam	Sesuai dengan perizinan	Telah Memenuhi Syarat	100
6	6/2/2025	Jenis Ikan yang Dilindungi	BANGUN JAYA REFANO	Bangka	Pelaku usaha sudah patuh dalam melaksanakan kegiatan	Telah Memenuhi Syarat	100
7	6/2/2025	Jenis Ikan yang Dilindungi	CV. EKA MULYA ABADI	Bangka	CV. Eka Mulya Abadi di tahun 2025 belum melakukan kegiatan pengiriman jenis ikan yang dilindungi dikarenakan tidak mendapatkan izin pengambilan dan kuota jenis ikan yang dilindungi, sehingga CV. Eka Mulya Abadi tidak melakukan kegiatan/pengiriman pengelolaan jenis ikan yang dilindungi.	Tidak melakukan aktivitas pemanfaatan jenis ikan dilindungi	100
8	6/3/2025	Jenis Ikan yang Dilindungi	CV. PRATAMA JAYA	Pangkal Pinang	Dari hasil pemeriksaan yang ditemukan bahwa pelaku usaha tidak menjual jenis ikan yang dilindungi	Tidak melakukan aktivitas pemanfaatan jenis ikan dilindungi	100
9	6/3/2025	Jenis Ikan yang Dilindungi	MULIWATI	Pangkal Pinang	Muliwati sudah memiliki SIPJI, pelaku usaha menjual jenis ikan air tawar tujuan lokal	Telah Memenuhi Syarat	100
10	6/3/2025	Jenis Ikan yang Dilindungi	HERYANTO KURNIAWAN TANUJAYA	Pangkal Pinang	Pelaku Usaha sudah patuh	Telah Memenuhi Syarat	100
11	6/18/2025	Jenis Ikan Membahayakan dan Merugikan (JIMM)	Toko Ikan Hias Trimax	Jl. DI. Panjaitan KM.8 Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur	Terdapat pemanfaatan ikan sapu-sapu (<i>Pterygoplichthys spp.</i>)	Penyerahan secara sukarela dan penanganan barang hasil pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	100

12	5/9/2025	KPB	Kelompok Bahari Mandiri	Jalan Trans Barelang Jembatan 6 Kota Batam	Nilai kepatuhan sebesar 77,8% dengan katagori baik sekali	Telah Memenuhi Syarat	100
13	6/19/2025	KPB	CV. Marine Fish	Lrg Karang Anyar RT.22 RW.07 Kel. Plaju Darat Kec. Plaju Kota Palembang	usaha berskala mikro dengan pengelolaan tradisional, secara umum telah memenuhi persyaratan usaha budidaya namun belum memiliki perizinan berusaha, Kepatuhan Teknis 80%.	Pembinaan dan Perbaikan	100
14	6/19/2025	KPB	CV. Marine Fish	Lrg Karang Anyar RT.22 RW.07 Kel. Plaju Darat Kec. Plaju Kota Palembang	usaha berskala mikro dengan pengelolaan tradisional, secara umum telah memenuhi persyaratan usaha budidaya namun belum memiliki perizinan berusaha, Kepatuhan Teknis 81%.	Pembinaan dan Perbaikan	100
15	6/19/2025	KPB	Kelompok Kerapu Lumpur	Jl. Sijuk Desa Air Seruk Kec. Sijuk Kab. Belitung	unit usaha berskala mikro dengan pengelolaan tradisional, secara umum telah memenuhi persyaratan usaha budidaya / menerapkan cara budidaya ikan yang baik namun belum memiliki perizinan berusaha	Pembinaan dan Perbaikan	100
16	6/13/2025	KPB	KELOMPOK RUMPUT LAUT KARIMUN (ahmad)	Selat Los, Senggarang, Tanjung Pinang	Belum memiliki NIB, KKPRL, CBIB. Unit usaha skala mikro	Pembinaan dan Perbaikan	100
17	6/19/2025	KPB	KPB Rumput Laut Karimun (Bujang)	Selat Los, Senggarang Kota Tanjung Pinang	Belum memiliki KKPRL, Belum memiliki CBIB. Unit usaha skala mikro	Pembinaan dan Perbaikan	100
18	6/19/2025	KPB	KPB Rumput Laut	Selat Los, Senggarang, Tanjung Pinang	Belum memiliki NIB, Belum memiliki KKPRL, Belum	Pembinaan dan Perbaikan	100

			Karimun (Jefri)		memiliki CBIB. Unit usaha skala mikro		
19	4/20/2025	Insidental Lainnya Pengolahan Ikan	Amzah Toni	Ranai Kota, Kab. Natuna	Pelaku usaha belum memiliki perizinan dan merupakan skala mikro	Pembinaan dan Perbaikan	100
20	6/19/2025	Aduan Masyarakat Pembudidayaan Ikan	Budi	Selat 2 Bintang	Sudah memiliki KKPR, belum mengajukan CPIB. Unit usaha skala mikro	Pembinaan dan Perbaikan	100
21	5/22/2025	Aduan Masyarakat Pembudidayaan Ikan	Herry	Madong Tanjung Pinang	Belum memiliki NIB, belum memiliki KKPRD. Unit usaha skala mikro	Pembinaan dan Perbaikan	100
22	6/13/2025	Aduan Masyarakat Pembudidayaan Ikan	PT. DAEHA SUSAN BATAM	Jl. Trans Bareleng Jembatan II Kel. Setokok Kec. Bulang Kota Batam	Pengelolaal limbah belum dilakukan secara optimal	Penerapan sanksi	100
23	6/19/2025	Aduan Masyarakat Pembudidayaan Ikan	Alias	Jl. Sijuk Desa Air Seruk Kec. Sijuk Kab. Belitung	unit usaha berskala mikro dengan pengelolaan tradisional, secara umum telah memenuhi persyaratan usaha budidaya / menerapkan cara budidaya ikan yang baik namun belum memiliki perizinan berusaha	Pembinaan dan Perbaikan	100
24	6/19/2025	Aduan Masyarakat Pembudidayaan Ikan	Arip	Selat Bintang 2	Belum memiliki KKPR, mau mengajukan hanya perlu didampingi karena ini merupakan KPB	Pembinaan dan Perbaikan	100
25	6/19/2025	Aduan Masyarakat Pembudidayaan Ikan	Aseng	Selat 2 Bintang	sudah memiliki CBIB dan KKPR	Telah Memenuhi Syarat	100
26	4/29/2025	Aduan Masyarakat Pembudidayaan Ikan	Eryanto	Selat 2 Bintang	Belum memiliki KKPR dan CBIB	Pembinaan dan Perbaikan	100

27	5/22/2025	Aduan Masyarakat Pembudidayaan Ikan	Nazaruddin	Madong, Tanjung Pinang	belum memiliki NIB, KKPRD, dan NPWP	Pembinaan dan Perbaikan	100
28	5/8/2018	Aduan Masyarakat Pembudidayaan Ikan	PT. MEGA HALIM NISHIKIGOI	Jalan Trans Bareleng Jembatan 6 Kota Batam	Nilai kepatuhan sebesar 77,8% dengan katagori baik sekali	Telah Memenuhi Syarat	100
29	5/26/2025	Insidental Lainnya Pembudidayaan Ikan	Farm Yoga	Lrg Karang Anyar RT.22 RW.07 Kel. Plaju Darat Kec. Plaju Kota Palembang	usaha berskala mikro dengan pengelolaan tradisional, secara umum telah memenuhi persyaratan usaha budidaya namun belum memiliki perizinan berusaha, Kepatuhan Teknis 80%.	Pembinaan dan Perbaikan	100
30	5/26/2025	Insidental Lainnya Pembudidayaan Ikan	Farm Yoga	Lrg Karang Anyar RT.22 RW.07 Kel. Plaju Darat Kec. Plaju Kota Palembang	usaha berskala mikro dengan pengelolaan tradisional, secara umum telah memenuhi persyaratan usaha budidaya namun belum memiliki perizinan berusaha, Kepatuhan Teknis 81%.	Pembinaan dan Perbaikan	100
31	6/5/2025	Insidental Lainnya Pembudidayaan Ikan	Hendi	Jl. Sujuk Desa Air Seruk Kec. Sujuk Kab. Belitung	unit usaha berskala mikro dengan pengelolaan tradisional, secara umum telah memenuhi persyaratan usaha budidaya / menerapkan cara budidaya ikan yang baik namun belum memiliki perizinan berusaha	Pembinaan dan Perbaikan	100
32	6/5/2025	Insidental Lainnya Pembudidayaan Ikan	Hendi	Jl. Sujuk Desa Air Seruk Kec. Sujuk Kab. Belitung	unit usaha berskala mikro dengan pengelolaan tradisional, secara umum telah memenuhi persyaratan usaha budidaya / menerapkan cara budidaya ikan yang	Pembinaan dan Perbaikan	100

					baik namun belum memiliki perizinan berusaha		
33	6/19/2025	Insidental Lainnya Pembudidayaan Ikan	Adi Sopian	Desa Pulau Tiga, Kec. Pulau Tiga Barat, Kab. Natuna, Prov. Kepri	Pelaku usaha belum memiliki perizinan berusaha, usaha yang dilakukan masih mikro dan kecil	Pembinaan dan Perbaikan	100
34	6/19/2025	Insidental Lainnya Pembudidayaan Ikan	Erlang Teguh Saputra	Desa Pulau Tiga, Kec. Pulau Tiga Barat, Kab. Natuna, Prov. Kepri	Pelaku usaha belum memiliki perizinan berusaha, usaha yang dilakukan masih mikro dan kecil	Pembinaan dan Perbaikan	100
35	6/19/2025	Insidental Lainnya Pembudidayaan Ikan	Rodial Huda	Desa Pulau Tiga, Kec. Pulau Tiga Barat, Kab. Natuna, Prov. Kepri	Pelaku usaha belum memiliki perizinan berusaha, usaha yang dilakukan masih mikro dan kecil	Pembinaan dan Perbaikan	100
CAPAIAN						35	100

Dari 35 kegiatan pengawasan yang dilaksanakan, capaian indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan pada triwulan II tahun 2025 adalah 100. Capaian ini sama dengan capaian triwulan I yaitu 100 juga. Hal ini dikarenakan kapabilitas pengawas perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam meningkat melalui bimtek atau pelatihan serta adanya kemudahan pengawasan melalui modul wasrisk khusus pada pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko yang telah mencakup keseluruhan komponen untuk capaian IKU, mulai dari persiapan, pelaksanaan kegiatan pengawasan, dan pelaporan. Meskipun pada tahun 2025 belum terdapat bimtek ataupun pelatihan di masing-masing bidang, namun pada triwulan IV tahun 2024 telah dilaksanakan *in-house training* di lingkup UPT Pangkalan PSDKP Batam untuk kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di masing-masing bidang dengan menggunakan modul wasrisk yang disediakan oleh Direktorat PSDP.

Penggunaan modul wasrisk telah meningkatkan akuntabilitas pengawasan,

karena sebelum kegiatan pengawasan dilaksanakan, terlebih dahulu harus terpenuhi seluruh kelengkapan persiapan pengawasan. Setelah seluruh kelengkapan persiapan pengawasan terpenuhi, kegiatan pengawasan baru dapat dilaksanakan pada hari sesuai dengan penjadwalan. Pelaporan kemudian secara otomatis disampaikan melalui sistem wasrisk kepada Direktur PSDP. Keseluruhan tahapan ini telah membantu Pengawas Perikanan untuk tertib dalam memenuhi seluruh kelengkapan yang diperlukan, serta mempermudah pengarsipan dan pelaporan hasil kegiatan pengawasan.

Pada tahun 2025, pagu anggaran pengawasan sumber daya perikanan sebesar Rp. 1,019,000,000,- dan setelah efisiensi menjadi Rp. 109.735.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 17.150.000,- atau 1,6% dari pagu anggaran dan 15,63 % dari pagu efektif. Capaian pengawasan sumber daya perikanan sangat baik mengingat indeks tercapai 100 dengan adanya keterbatasan anggaran. Selain itu terjadi peningkatan signifikan pada jumlah unit usaha perikanan yang diawasi, dikarenakan sudah adanya perjanjian kinerja di UPT Pangkalan PSDKP Batam yang diturunkan kepada masing-masing pengawas di seluruh lingkup UPT Pangkalan PSDKP Batam. Kemudian untuk lebih memantapkan perencanaan kegiatan di tahun 2025, telah diadakan rapat konsolidasi pengawasan di lingkup UPT Pangkalan PSDKP Batam pada tanggal 21-24 April 2025 dengan mengundang narasumber untuk membekali pengawas perikanan menghadapi dinamika pengawasan perikanan di tahun 2025.

Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan objek pengawasan pada beberapa lokasi satuan pengawasan, mengingat pada tahun ini pengawasan sangat difokuskan pada pelaku usaha skala besar. Penggunaan modul wasrisk yang hanya dapat

dilakukan pada pengawasan PBBR juga menjadi kendala, hal ini karena untuk jenis kegiatan pengawasan lainnya masih menggunakan form manual sehingga berpotensi menyebabkan adanya ketidaksesuaian dalam pengisian formulir hasil pengawasan. Efisiensi anggaran turut menjadi kendala, mengingat keterbatasan kegiatan operasional yang dapat dilakukan, sehingga objek pengawasan yang dapat dijangkau menjadi lebih kecil cakupannya.

Evaluasi dan analisis pada IKU11 dan IKU12 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 7 (Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan)** yaitu:

11) Indeks pengenaaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	TW I	Triwulan II 2025		
Kode	Uraian			Target	Capaian	%
IKU11	Indeks pengenaaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	81	120	70	81	115,71

Capaian indeks pengenaaan sanksi administratif Pangkalan PSDKP Batam triwulan II 2025 sebesar 115,71, yang mana diperoleh indeks dari target triwulan II 2025 adalah 70, namun tercapai 81. Capaian ini menurun dibandingkan dengan capaian triwulan I. Hal ini merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penanganan sanksi administratif berdasarkan PERMEN-KP nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di bidang Kelautan dan Perikanan. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah pengenaaan sanksi administratif bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan penetapan pertama dengan keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil

ekspose. Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif terdiri atas gabungan antara anggaran pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan serta anggaran analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pada triwulan II tahun 2025, Pangkalan PSDKP Batam telah melaksanakan pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan sejumlah 18 (delapan belas) kasus diantaranya: 5 (lima) kasus di bidang Kelautan dan 13 (tiga belas) kasus di bidang Perikanan dengan rincian sebagai berikut.

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KETERANGAN
1	KM. TRISTAN MANDIRI IX	SP 1	Terpantau Berada di ZONA INTI Kawasan KONSERVASI
2	KM. TRISTAN MANDIRI III	SP 1	Terpantau Berada di ZONA INTI Kawasan KONSERVASI
3	KM. NISSAN LAUT	SP 1	JALUR PENANGKAPAN IKAN
4	KM. KARAOKE II	SP 1	Terpantau Berada di ZONA INTI Kawasan KONSERVASI
5	KM. MARGANA SAKTI II	SP 1	JALUR PENANGKAPAN IKAN
6	KM. OCEAN FISH	SP 1	JALUR PENANGKAPAN IKAN
7	KM. SUPER REJEKI	SP 1	JALUR PENANGKAPAN IKAN
8	KM. LAUTAN SUPRI CA	SP 1	Transshipment
9	KM. JAYA UTAMA	SP 1	Transshipment

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KETERANGAN
10	KM. LEON MAKMUR	SP 1	Transhipment
11	KM. GURITA-2	SP 1	JALUR PENANGKAPAN IKAN
12	KM. OMEGA	SP 1	PELABUHAN PANGKALAN
13	PT. Amedco Jaya Maritim	Rp 21.190.920,-	<p>1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)</p> <p>2. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi</p>
14	PT. Telaga Bintang Jaya	Rp 17.284.560,-	<p>1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis</p>

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KETERANGAN
			<p>Nasional Tertentu (RZ KSNT)</p> <p>2. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi</p>
15	Jejaka Advenadus	SP 1	<p>1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)</p> <p>2. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi</p>

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KETERANGAN
16	PT. Batamas Puri Permai	Rp 276.531.480,-	<p>1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)</p> <p>2. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi</p>
17	PT. Megah Bangun Sejahtera	Rp 308.881.560,-	<p>1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)</p> <p>2. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi</p>

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KETERANGAN
18	PT BATAM NARA INDONESIA	SP II	Melakukan kegiatan pembudidayaan/Pembesaran Udang Vannamei yang tidak memenuhi komitmen perizinan berusaha berupa sertifikat Standar Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) Belum memiliki PB-UMKU (CBIB)

12) Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	TW I	Triwulan II 2025		
Kode	Uraian			Target	Capaian	%
IKU12	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	81	120	70	81	115,71

Capaian indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan Pangkalan PSDKP Batam sebesar 115,71 yang mana diperoleh dari target indeks pada triwulan II 2025 adalah 70 dan tercapai 81. Hal ini sama menurun dibandingkan capaian pada triwulan I. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Tercapainya indikator ini dikarenakan sudah dilaksanakannya tindak lanjut terhadap 106 (seratus enam) unit kapal perikanan Indonesia yang diindikasikan

melakukan pelanggaran sampai dengan Triwulan II dari 106 (seratus enam) unit kapal perikanan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Adapun detailnya adalah sebagai berikut : 2 (dua) unit kapal diterbitkan surat pemanggilan, 43 (empat puluh tiga) unit kapal dalam tahap permintaan keterangan, 40 (empat puluh) kapal yang dikategorikan tidak melakukan pelanggaran setelah dilaksanakan evaluasi oleh tim dari Tim Kerja Penanganan Pelanggaran dan Tim Kerja Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan, dan 21 (dua puluh satu) unit kapal yang telah dikeluarkan Surat Peringatan I (SP 1) atas pelanggaran yang dilakukan.

Pagu anggaran 2025 untuk pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan masuk dalam anggaran pengenaan sanksi administratif mendapat pagu sebesar Rp 300.800.000,- sebelum anggaran direvisi dan dipangkas terkait kebijakan penghematan anggaran dari pusat dan setelah direvisi terkait penghematan anggaran pagunya berubah menjadi Rp 59.262.000,- dan telah terealisasi sejumlah Rp 38,582,935,- atau sekitar 65,11 %.

Evaluasi dan analisis pada IKU13 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 8** (***Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan***) yaitu:

13) Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	TW I	Triwulan II 2025		
Kode	Uraian			Target	Capaian	%
IKU13	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	94	109,89	91	100	109,89

Pengukuran capaian Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dilakukan per triwulan dan hasilnya sudah optimal pada triwulan II

tahun 2025 yaitu 109,89% sama dengan capaian triwulan I yaitu 109,89% juga. Indikator ini merupakan perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan proses penyidikan mulai tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan mengacu kepada Keputusan Dirjen PSDKP Nomor : KEP.372/DJ-PSDKP/2011 perihal Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan. Capaian ini membandingkan antara jumlah kasus di tahun berjalan yang telah selesai ditangani. Tercapainya indikator ini dikarenakan kasus di Pangkalan PSDKP Batam tahun 2025 pada Triwulan II telah menangani 4 (empat) kasus Tindak Pidana Perikanan (TPP), 2 (dua) kasus sementara dalam proses persidangan dan 2 (dua) kasus lagi dalam proses penyidikan yang berkasnya sudah hampir selesai dan dijadwalkan bulan Juli tahun 2025 dilaksanakan Serah Terima Berkas Perkara di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Pangkalan PSDKP Batam tahun 2025 mendapat pagu anggaran pengenaan sanksi pidana sebesar Rp 116.375.000,- dan setelah adanya program efisiensi dari pusat, anggaran sanksi pidana berubah menjadi Rp 31.606.000,-. Sampai dengan Triwulan II, realisasi anggaran dari Tindak Pidana Perikanan pada mata anggaran 2351 sebesar Rp 21.555.000,- atau 18,52% dari pagu anggaran dan sebesar 68,20 % dari pagu efektif. Karena terbatasnya anggaran penyidikan di akun 2351, kami mendapat tambahan anggaran penyidikan dari akun 2350 (Tindak Lanjut Hasil Pengawasan) sejumlah 6 (enam) kasus dengan total anggaran Rp 620.240.000,- dan telah terealisasi sejumlah Rp 102.729.230,- atau 16,56 % dan akan terus direalisasikan seiring dengan perkembangan penyelesaian kasus yang ditangani oleh PPNS Pangkalan PSDKP Batam. Kendala yang dihadapi dalam

penyelesaian penyidikan tindak pidana perikanan adalah terbatasnya anggaran perjalanan dinas dalam penyelesaian kasus tindak pidana perikanan. Sementara anggaran perjalanan dinas yang tersedia di akun 2351 sudah habis dan belum ada penambahan anggaran perjalanan dinas, sementara berkas perkara kita serah terimakan di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang berada di Tanjung Pinang, sehingga membutuhkan anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan tersebut. Kami telah bersurat untuk mengajukan permohonan penambahan anggaran di Direktorat Penanganan Pelanggaran di pusat dan sampai saat ini belum juga terealisasi.

Detail Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang ditangani PPNS Pangkalan PSDKP Batam sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut :

No	Nama Tersangka	Nama Kapal	Pelanggaran	Keterangan
1.	LEI YONG	KM. SUMBER JAYA 1990	Melakukan usaha perikanan berupa penangkapan ikan di Perairan Karang Hawkins/Karang Telo Laut Bangka WPPNRI 711 tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dengan menggunakan alat tangkap jenis Muroami yang dilarang dioperasikan di seluruh WPPNRI serta melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen surat persetujuan berlayar (SPB)	Inkrah

No	Nama Tersangka	Nama Kapal	Pelanggaran	Keterangan
2.	NGO BINH DANG	KM. 936 TS Alias KG 93682 TS	Melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Laut Natuna Utara, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap Jaring Tarik Trawl yang dilarang dioperasikan diseluruh wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia (WPPNRI) karena mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungannya	Proses Sidang
3.	CAO VAN PHUONG	KG 95762 TS	Melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Laut Natuna Utara, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap Jaring Pair Trawl yang dilarang dioperasikan	Proses Sidang

No	Nama Tersangka	Nama Kapal	Pelanggaran	Keterangan
			diseluruh wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia (WPPNRI) karena mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungannya	
4.	LE VAN PHEN	KG 6219 TS	Melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Laut Natuna Utara, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap Jaring Pair Trawl yang dilarang dioperasikan diseluruh wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia (WPPNRI) karena mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungannya	Proses Penyidikan

No	Nama Tersangka	Nama Kapal	Pelanggaran	Keterangan
5.	TRAN VAN KHAN	KG 6277 TS	Melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Laut Natuna Utara, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap Jaring Pair Trawl yang dilarang dioperasikan diseluruh wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia (WPPNRI) karena mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungannya	Proses Penyidikan

Evaluasi dan analisis pada IKU14, IKU15, IKU16, IKU17, IKU18, IKU19, IKU20, IKU21, IKU22, IKU23, IKU24 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 09 (Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan)** yaitu:

(14) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	TW I	Triwulan II 2025		
Kode	Uraian			Target	Capaian	%
IKU14	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	71,5	-	-	-	-

Target nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Pangkalan PSDKP Batam tahun 2025 adalah 71,5 dan menjadi target tahunan. Target tahun 2025 adalah 1 laporan pada akhir tahun sehingga triwulan II tahun 2025 belum ada reasalisasi. Adapun anggaran tahun 2025 untuk kinerja perencanaan anggaran Rp. 91.650.000,- setelah efisiensi menjadi Rp. 0,-.

(15) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	TW I	Triwulan II 2025		
Kode	Uraian			Target	Capaian	%
IKU15	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	92	-	82	96,41	117,57

Target Nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pangkalan PSDKP Batam adalah 92 dan menjadi target semesteran. Pada semester I atau triwulan II, nilai IKPA Pangkalan PSDKP Batam 96,41 sehingga capaian IKUnya adalah 117,57%. Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran adalah proses evaluasi dan spending review terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada fitur Monev PA aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan. adapun indikatornya yaitu (1) Revisi DIPA, (2) Deviasi DIPA (3) Pengelolaan UP, (4) LPj Bendahara, (5) Data Kontrak, (6) Penyelesaian Tagihan, (7) Penyerapan Anggaran Tahun 2022 (8) Retur SP2D, (9) Perencanaan Kas, (10) Pengembalian SPM, (11) Dispensasi SPM dan (12) Pagu Minus. Adapun anggaran tahun 2025 untuk kinerja pelaksanaan anggaran Lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Batam yaitu pelaksanaan pengelolaan keuangan sebesar Rp. 75.760.000,- dan setelah efisiensi menjadi Rp.

15.200.000,- serta terealisasi sebesar Rp. 13.500.034,- atau 17.82% dari pagu anggaran dan 88,82% dari pagu efektif.

16) Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Bat am

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	TW I	Triwulan II 2025		
Kode	Uraian			Targ et	Capaian	%
IKU16	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam	81	-	77	80,62	104,70

Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Batam tahun 2025 adalah 81 dan menjadi target semesteran. Nilai IPASN semester I atau sampai dengan triwulan II adalah 80,62 melebihi dari target semester I yaitu 77 sehingga capaian IKU IPASN adalah 104,70. Nilai diperoleh dari komponen pembentuk yaitu (1) Kualifikasi yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP, (2) Kompetensi yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), (3) Kinerja yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Perstasi Kerja Online KKP yang dikolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP) dan (4) Disiplin yaitu berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin. Upaya untuk mencapai target IP ASN tersebut, pegawai sudah diingatkan untuk mengikuti diklat dan seminar baik melalui portal (e-melia) maupun ditempat pelatihan lainnya. Adapun anggaran tahun 2025 untuk Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Batam yaitu penatausahaan SDM dan jabatan

fungsional sebesar Rp. 87.500.000,- menjadi Rp. 38.704.000,- karena efisiensi serta terealisasi sebesar Rp. 38.816.314,- atau sebesar 99,34% dari pagu efektif atau 44,36% dari pagu anggaran. Pada tahun 2024, IP ASN Pangkalan PSDKP Batam 87,9 dan diharapkan pada tahun 2025 IP ASN pegawai Pangkalan PSDKP Batam bisa meningkat atau diatas capaian tahun 2024.

17) Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	TW I	Triwulan II 2025		
Kode	Uraian			Target	Capaian	%
IKU17	Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	86	-	-	-	-

Target Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Batam yaitu 86 dan menjadi target tahunan. SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Hasil penilaian oleh Inspektorat Mitra berdasarkan lembar kerja evaluasi yang disusun itjen dengan mengacu pada lembar kerja evaluasi AKIP oleh KEMENPAN RB. Anggaran untuk pengelolaan kinerja organisasi pada tahun 2025 sebesar Rp. 72.000.000,- dan belum ada penyerapan karena semua terkena blokir efisiensi. Tahun 2024, nilai SAKIP Pangkalan PSDKP Batam adalah 85,2 dan diharapkan akan meningkat pada tahun 2025 ini.

18) Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Batam (%)

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	Triwulan II 2025		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU18	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Batam (%)	100	100	100	100

Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Batam mendapat target 100% dan tercapai 100%. Hal ini sama dengan capaian pada triwulan I 2025 dan juga tahun 2024. Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Pangkalan PSDKP Batam dapat di simpulkan sebagai berikut; Pengendalian rutin organisasi yang sudah tertuang di Renstra PSDKP, Pengendalian Rutin Perencanaan sudah dilakukan 2 kali Revisi DIPA pada triwulan II tahun 2025, Pengendalian PBJ, dimana Pangkalan PSDKP sudah membentuk tim POKJA, dan menginput RUP TA 2025 ke Aplikasi sirup.kkp.go.id, Pengendalian Penghapusan BMN sudah dilaksanakan usulan penghapusan sudah dilakukan lelang oleh KPKNL Batam dengan Risalah lelang pada triwulan II tahun 2025.

Pada Kegiatan Pengendalian internal Pemerintah Pangkalan PSDKP Batam TW II tahun 2025 telah menetapkan rencana pengendalian MR sebanyak 13 kegiatan yg sudah terealisasi di TW II sebanyak 13 Kegiatan Adapun kegiatan sebagai berikut Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Target sebanyak 3 kegiatan dan realisasi sebanyak 3 kegiatan. Kegiatan Kelautan dan Perikanan yang dikenakan sanksi Administratif terdiri 2 Kegiatan dan terealisasi 2 kegiatan, Kegiatan Sarana dan prasarana target sebanyak 3 kegiatan dan terealisasi 3 kegiatan. Kegiatan pemantuan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (MR Pencemaran) dengan target 1 kegiatan dan terealisasi 1 kegiatan, Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan ditargetkan pada Triwulan II tahun 2025 target 1 realisasi 1 kegiatan, kegiatan unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya 1 kegiatan dan terealisasi 1 kegiatan, kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan 1 Kegiatan terealisasi 1 Kegiatan dan Operasi intelijen Sumber daya Kelautan 1 Kegiatan dengan realisasi 1 kegiatan. Adapun pagu anggaran pengelolaan keuangan sebesar Rp. 75.760.000,- dan pagu efektif sebesar Rp. 15.200.000,- serta terealisasi Rp. 13.500.034,- atau 17,82% dari pagu anggaran dan 88,82% dari pagu efektif.

- 19) Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	Triwulan II 2025		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU 19	Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95	95	100	105,26

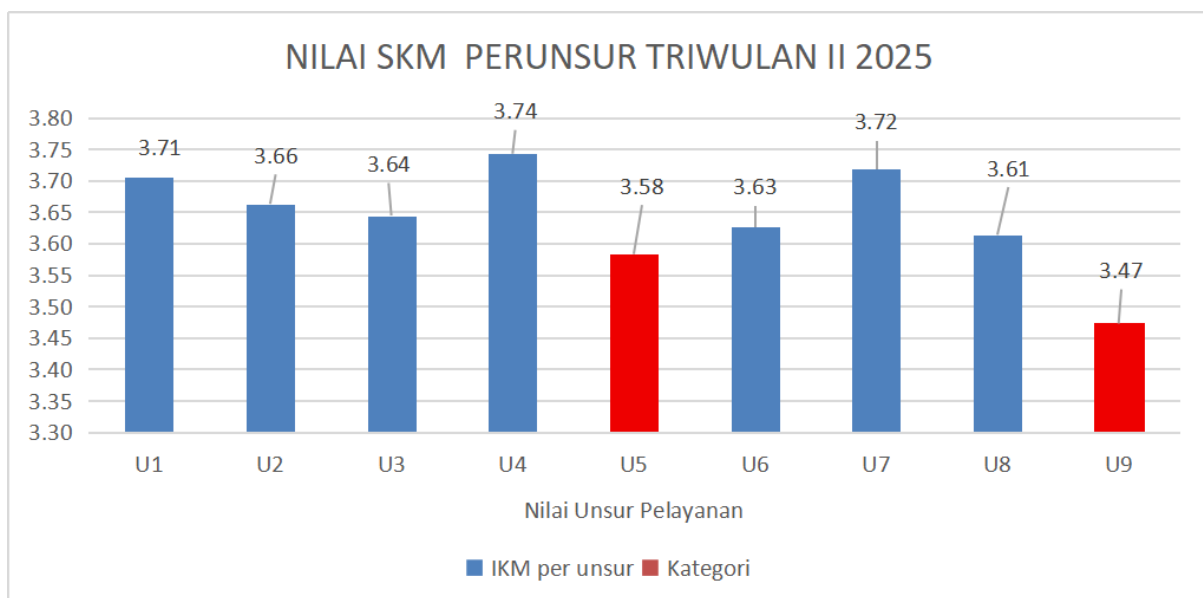
Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan ditargetkan 95% dan tercapai 100% dengan nilai capaian 105,26. Hal ini sama dengan capaian triwulan I 2025. Penyebab tercapainya dikarenakan masih belum ada temuan dan tindak lanjut dari Itjen di Pangkalan PSDKP Batam pada triwulan I tahun 2025. Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP. Adapun pagu anggaran pengelolaan keuangan sebesar Rp. 75.760.000,- dan pagu efektif sebesar Rp. 15.200.000,- serta terealisasi Rp. 13.500.034,- atau 17,82% dari pagu anggaran dan 88,82% dari pagu efektif.

20) Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam

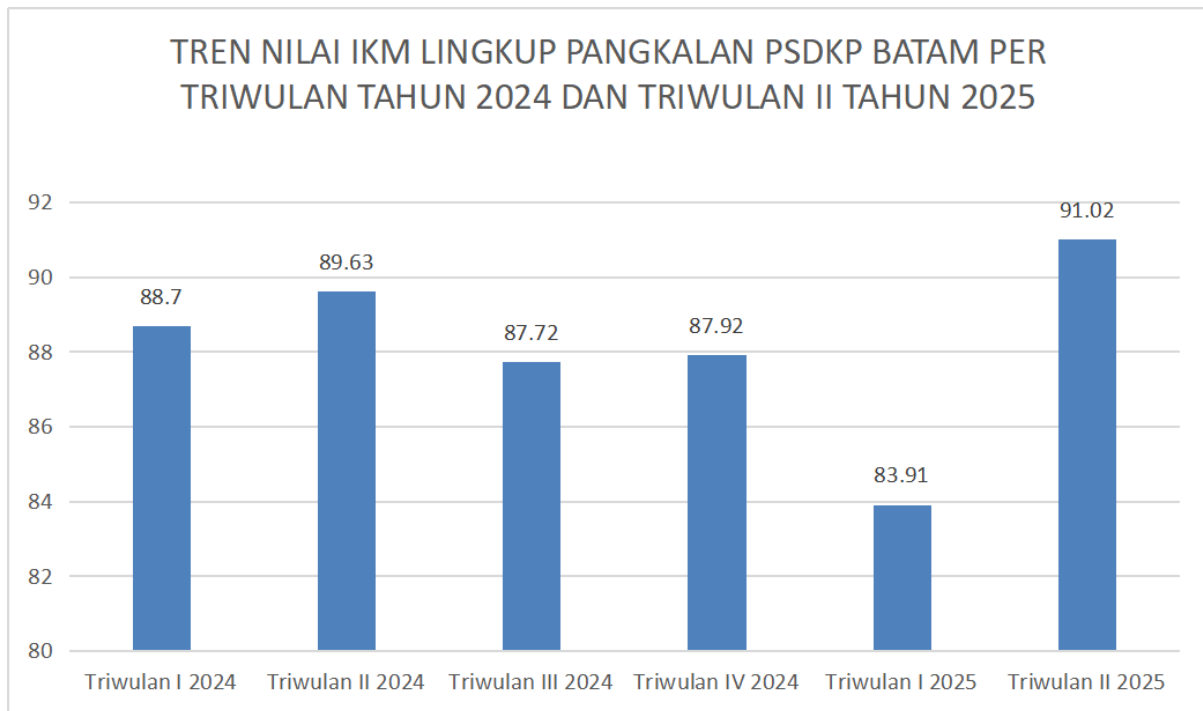
Indikator Kinerja Utama		Target 2025	Triwulan II 2025		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU20	Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam	88,5	88,5	91,02	102.85

Untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna SLO dilakukan survey pada setiap triwulannya. Kegiatan IKM bertujuan untuk mengukur pelayanan terhadap pengguna layanan SLO baik yang ada di UPT Pangkalan PSDKP Batam maupun Satuan Pengawas. Diharapkan terhadap kegiatan ini adalah adanya evaluasi untuk meningkatkan serta meminimalisir kekurangan pada pelayanan yang ada.

Nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Pangkalan PSDKP Batam triwulan II adalah 91,02 yang naik dari nilai SKM Triwulan I tahun 2025 yaitu 83,91 artinya ada peningkatan nilai SKM dari triwulan I sebelumnya dan diatas target 88,5 sehingga capaian nilai kepuasan Masyarakat lingkup Pangkalan PSDKP Batam sebesar 102,85. Dengan nilai survey kepuasan Masyarakat sebesar 91,02 menandakan bahwa pelayanan di lingkup Pangkalan PSDKP Batam telah dilaksanakan dengan sangat baik dan ada perbaikan pelayanan. Hal ini dikarenakan pengawas perikanan serta petugas pelayanan telah mengikuti pelatihan Budaya Pelayanan Prima dan menjelaskan maksud dan tujuan dari survey kepuasan masyarakat ini sehingga pelaku usaha memberikan penilaian yang objektif. Hasilnya, nilai SKM triwulan II 91,02 naik dari triwulan I sebesar 83,91. Unsur pelayanan merupakan unsur terendah yaitu Sarana Prasana (3,47) dan unsur dengan nilai tertinggi adalah tarif dan biaya mendapatkan nilai tertinggi 3,74 dari unsur layanan.



Gambar 3. Grafik nilai SK Per unsur triwulan II 2025



Gambar 4. Tren nilai IKM Tahun 2024 sampai dengan triwulan II 2025

Jika dibandingkan dengan tahun 2024 sampai dengan Triwulan II 2025, nilai SKM triwulan II tahun 2025 mendapatkan nilai paling tinggi. Hal ini disebabkan pemberi layanan sudah memahami tujuan dari survey dan maksud dari masing-masing pertanyaan serta petugas melakukan perbaikan pelayanan.

Namun demikian, untuk menjaga kualitas layanan pada triwulan III 2025 perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memberikan layanan SLO sesuai SOP yang ada;
2. Responsife terhadap pertanyaan atau keluhan dari pengguna layanan;
3. Petugas/Pengawas perikanan tetap menjelaskan maksud dan tujuan survey kepuasan Masyarakat terhadap penerima layanan sebelum memberikan penilaian;

4. Petugas/Pengawas perikanan tetap menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dalam SKM sehingga pengguna layanan memberikan penilaian dengan objektif dan benar.

21) Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	TW I	Triwulan II 2025		
Kode	Uraian			Targ et	Capai an	%
IKU21	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	80	-	-	-	-

Target Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Pangkalan PSDKP Batam tahun 2025 adalah 80 dan menjadi target tahunan. Pelaksanaan WBK nantinya akan berdasarkan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2025 pagu anggaran pelaksanaan reformasi birokrasi sebesar Rp. 98.314.000.- menjadi Rp. 16.820.000,- setelah efisiensi serta belum ada penyerapan karena terkena efisiensi dan hanya tersisa untuk kegiatan forum konsultasi publik.

22) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Targ et 2025	TW I	Triwulan II 2025		
Kode	Uraian			Target	Capaian	%
IKU2 2	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	80	-	-	-	-

Target Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP yaitu 80 dan menjadi target tahunan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip; dan³⁹
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana.

Adapun anggaran tahun 2025 untuk Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan persuratan Pangkalan PSDKP Batam Rp. 30.876.000,- dan belum terealisasi karena semua anggaran diblokir efisiensi.

23) Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	TW I	Triwulan I 2025		
Kode	Uraian			Target	Capaian	%
IKU23	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Inovasi)	1	-	-	-	-

Target jumlah inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Batam adalah 1 inovasi dan menjadi target tahunan. Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria inovasi selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatutan. Pada tahun 2025 pagu anggaran untuk implementasi inovasi pelayanan publik yang dihasilkan yaitu innovation Bootcamp dan Lomba Inovasi Tahun 2025 sebesar Rp. 28.800.000,- berupa jaldis namun belum ada realisasi karena lomba inovasi dilakukan akhir tahun 2025.

24) Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	TW I	Triwulan II 2025		
Kode	Uraian			Target	Capaian	%
IKU24	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70	-	-	-	-

Target Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam adalah 70 dan menjadi target tahunan. Tercapainya indikator ini karena terlaksananya serta pemenuhan dokumen dalam budaya kerja. Implementasi program-program budaya yaitu 5 menit sebelum jadwal, ringkas, rapi, resik, rawat,

rajin, upayakan data terkini, organisasikan rapat, catat, aksi, arsipkan, tegakan aturan dengan akuntabel dan transparan, belanjakan anggaran secara realistis, akuntabel dan Amanah, ASN PSDKP produktif kerja, menyelesaikan tugas dengan tepat, hargai, motivasi dan inisiatif, gelorakan Gerakan hemat energi telah diterapkan di Pangkalan PSDKP Batam. Pada tahun 2025 pagu anggaran untuk implementasi program budaya kerja yang dihasilkan yaitu innovation Bootcamp dan Lomba Inovasi Tahun 2025 Rp. 28.800.000,- berupa jaldis namun belum ada realisasi karena anggarannya terkena blokir efisiensi dan lomba inovasi dilakukan akhir tahun 2025.

3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk Penghitungan efisiensi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2022 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pada Triwulan II tahun 2025 ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengatur tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2025. Inpres ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Dengan diberlakukannya inpres tersebut, maka anggaran Pangkalan PSDKP Batam mengalami efisiensi yaitu pemblokiran anggaran. Namun, efisiensi tersebut tidak merubah target kinerja organisasi sehingga pagu tetap seperti semula namun dilakukan pemblokiran. Awal pagu Pangkalan PSDKP Batam tahun 2025 adalah Rp. 39.350.325.000 menjadi Rp 32.142.276.000 sampai triwulan II tahun 2025 atau menjadi 81,68% dari pagu awal. Menindaklanjuti efisiensi anggaran tersebut banyak

hal yang dilakukan di Pangkalan PSDKP Batam yaitu pembatasan penggunaan Listrik, jaldis yang selektif, dan penggunaan kendaraan dinas yang selektif juga. Selain itu, kegiatan pengawasan yang menjadi *core* utama Pangkalan PSDKP Batam tetap terlaksana dan memenuhi ekspektasi atau rencana aksi yang sudah ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari nilai Indeks kinerja pemeriksaan pelaku usaha kelautan dan perikanan masing-masing 100% artinya dengan anggaran terkena efisiensi kegiatan pengawasan dapat dilakukan dengan baik dan sesuai target. Pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagian besar dilakukan pemeriksaan terhadap lebih dari satu pelaku usaha dalam satu surat perintah tugas (SPT) sehingga capaian output dapat mencapai target dengan penggunaan anggaran yang efektif hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja pemeriksaan pelaku usaha kelautan maupun perikanan yang tercapai 100 %.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran Pangkalan PSDKP Batam TA. 2025 sebesar Rp. 39.350.325.000,-. Pada triwulan II tahun 2025 realisasi anggaran sebesar Rp. 12.047.976.437,- atau 37,48%. Rincian realisasi anggaran Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Batam Triwulan I Tahun 2025

No	Kode	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi	
				(Rp)	%
Pengelolaan Kelautan dan Perikanan					
1	2350	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	14.684.931.000	2.109.124.972	14.36

2	2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	467.175.000	60.137.935	12,87
3	2352	Pemantauan dan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2.041.537.000	56.606.900	2,77
4	2353	Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	200.000.000	0	0
Dukungan Manajemen					
5	2355	Dukungan Manajemen internal Lingkup Ditjen PSDKP	21.956.682.000	9.822.106.630	44,73
TOTAL			39.350.325.000	12.047.976.437	30,61

BAB IV PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Batam triwulan II Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan capaian kegiatan Pangkalan PSDKP Batam yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IKM). Terhadap capaian IKU dan IK tersebut dilakukan analisis serta evaluasi sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
2. Hasil capaian kinerja sasaran Pangkalan PSDKP Batam triwulan II tahun 2025 seluruhnya mencapai target yang diperjanjikan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) **106,34** dengan predikat **BAIK**. Hal tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan seluruh kegiatan yang mencapai target dengan perencanaan kinerja dan anggaran yang baik serta pelaksanaan kegiatan dengan kemampuan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu juga adanya koordinasi maupun pendampingan dari Eselon II lingkup Ditjen. PSDKP serta kerja sama dengan instansi terkait.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja Pangkalan PSDKP Batam triwulan II tahun 2025, sebagai upaya peningkatan capaian kinerja pada periode selanjutnya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagai berikut:

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1.	Peningkatan penyerapan anggaran dan kinerja Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat kalender operasi kapal pengawas dan speed boat triwulan III dan IV 2025
2.	Kepastian anggaran pembinaan pokmaswas karena masih terboklir seluruhnya	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan bagian program Sesditjen PSDKP terkait anggaran pembinaan pokmaswas

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samuel Sandi Rundupadang
Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Batam

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

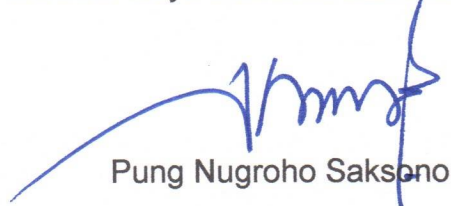
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Maret 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam


Semuel Sandi Rundupadang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	82
2	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	2	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92
		3	Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)	92
3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	4	Persentase sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		5	Persentase prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		6	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100
4	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	7	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75
		8	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (Nilai)	75
5	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	9	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)	100
6	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	10	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100
7	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	81
		12	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81
8	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	13	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	94
9	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	14	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	71,5
		15	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	92

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		16 Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Batam (Indeks)	81
		17 Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	86
		18 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Batam (%)	100
		19 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95
		20 Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	88,5
		21 Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	80
		22 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	80
		23 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Batam (Inovasi)	1
		24 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	a. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	14.684.931.000
	b. Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	467.175.000
	c. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2.041.537.000
	d. Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	200.000.000
2.	Program Dukungan Manajemen	21.956.682.000
Total Anggaran Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2025		39.350.325.000

Jakarta, 19 Maret 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam

Semuel Sandi Rundupadang